

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN KIMIA
BERBAHAYA PADA TAHU DI PASAR TRADISIONAL
RUMBIO KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat-syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

RIFKA ASRIANI
NIM. 10927007869

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

KATA PENGANTAR

Assalamu”alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN-BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA TAHU DIPASAR TRADISIONAL RUMBIO KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999”.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membuka tabir keilmuan bagi ummat islam, sehingga berkat ajaran beliau dunia jadi berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang pesat dan menjadikannya sebagai acuan dalam berfikir dan beramal untuk kesuksesan hidup didunia dan akhirat.

Dari hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Ayah As’ari dan Ibu Asni tercintayang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang serta aliran Do’a yang tak henti-hentinya agar penulis terus maju dan bersemangat dalam menjalani hidup ini,kepada Suamiku tercinta Marhot Siregar kepada kedua mertua Bpk.H. Awaluddin Siregar dan Hj. Nuraman. Buat kakek dan nenek, saudaraku satu-satunya Hasbi Heldika, paman dan bibi, Saudara-saudara Iparku dan Keponakanku yang telah memberikan semangat dan inspirasi untuk penulis serta untuk yang terkasih dan

tersayang anakku Riska Aulia sebagai penyemangat dan pelepas lelah disetiap aktivitasku.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku dekan fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum .
2. Ibu Dr. Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Bapak H. Muhammad Kastulani S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum dan Bapak
3. Ibuk Hj. Nuraini Sahu S.H., M.H. dan Bapak H. Maghfirah, M.Ag Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan seluruh dosen serta karyawan (segenap akademik) Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Azwar Azis, SH, MH selaku pembimbing saya yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, petunjuk dan nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak H. Maghfirah, M.Ag selaku penasehat Akademis yang memberikan nasehat dan masukan-masukan dalam pelaksanaan skripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan UIN SUSKA Pekanbaru Riau dan Bapak kepala perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum serta seluruh Karyawan dan Karyawati yang telah Berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi ini.

7. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Pekanbaru Riau Angkatan 2009 Khususnya Lokal Ilmu Hukum 4 (empat) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Untuk pihak yang tidak disebutkan yang telah banyak membantu penulisan selama skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih

Atas semua jasa tersebut penulis berdo’a kepada Allah SWT agar ilmu dan amal yang telah diberikan itu mendapat imbalan dan balasan yang setimpal dan berlipat ganda di sisi Allah SWT, Aamiin ya Rabbal’Alamin. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Akhir kata seandainya terdapat kejanggalan-kejanggalan yang tanpa penulis sengaja dan penulis sadari dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon kritik serta masukan-masukan yang bersifat membangun, demi tercapainya hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermamfaat dalam meningkatkan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan Hukum serta bermamfaat bagi siapapun yang membacanya.

Pekanbaru, November 2013

RIFKA ASRIANI
NIM 10927007869

ABSTRAK

Dalam jual-beli terdapat dua subjek yaitu penjual yang kedudukannya sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Ketika proses produksinya, para pelaku usaha ataupun produsen sering kali tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai produk makanan yang membahayakan kesehatan merupakan faktor utama penyebab produsen menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya sebagai campuran makanan. Hal tersebut juga ditunjang dengan perilaku konsumen yang cenderung membeli makanan yang harganya murah tanpa memperhatikan kualitas, dengan demikian penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dianggap hal yang biasa oleh produsen.

Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks jelas membahayakan keselamatan para konsumennya. Bagaimana sebenarnya perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen atas barang konsumsi yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam hal ini maka penulis menjadikan pasar tradisional Rumbio sebagai lokasi penelitian yang mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu yang dijual di Pasar Tradisional Rumbio kabupaten Kampar. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu di Pasar Tradisional Rumbio kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara, angket dan studi pustaka.

Dari hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa Perlindungan hukum terhadap bahan-bahan kimia berbahaya pada tahu di pasar tradisional Rumbio tidak berjalan disebabkan pihak-pihak yang terkait didalamnya tidak berperan sama sekali. Selain itu, para pedagang tahu di pasar tradisional Rumbio juga tidak mendapatkan pembinaan sehingga para pedagang tidak peduli dengan keselamatan konsumen. Selain itu, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan konsumen terhadap bahan-bahan kimia pada tahu di pasar tradisional Rumbio yaitu kurang mengetahuinya konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen dan pelaku usaha pun tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Selain itu faktor yang paling berpengaruh adalah BPOM tidak serius dan tidak tegas dalam menjalankan tugasnya, BPOM hanya melakukan razia sebagai formalitas dan hanya dipasar-pasar besar saja yang dilakukan hanya sekali dalam setahun pada saat mendekati bulan ramadhan. Akibatnya sanksi yang seharusnya diberlakukan, tidak dijalankan sama sekali.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Metode Penelitian	5
G. Sistematika Penulisan	8
 BAB II GAMBARAN UMUM PASAR TRADISIONAL RUMBIO KABUPATEN KAMPAR	
A. Kondisi Umum Pasar Tradisional Rumbio	10
B. Pedagang di Pasar Tradisional Rumbio	11
C. Ekonomi dan Sosial Masyarakat Rumbio	11
 BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	14
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	15
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	18
4. Prinsip-prinsip dalam Perlindungan Konsumen	20
5. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	29
1. Pengertian Konsumen	29
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	30

C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	32
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	32
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	32
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	34
4. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Bahan-bahan Kimia Berbahaya dan dampaknya	38
1. Boraks	38
2. Formalin.....	39
3. Makanan Yang Biasanya Mengandung Formalin Atau Boraks	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Perlindungan Konsumen terhadap Bahan-bahan Kimia Berbahaya Pada Tahu di Pasar Tradisional Rumbio	43
B. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Penerapan Perlindungan Konsumen Dipasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai dua sifat individu dan sosial. Secara individu mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lain. Secara sosial manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, salah-satu dari bentuk hubungan sosial itu adalah jual-beli.¹

Dalam jual-beli terdapat dua subjek yaitu penjual yang kedudukannya sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Penjual sebagai pelaku usaha setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan pembeli sebagai konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²

Dalam proses produksinya, para pelaku usaha ataupun produsen sering kali tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai produk

¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000. h. 64.

²Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

makanan yang membahayakan kesehatan merupakan faktor utama penyebab produsen menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya sebagai campuran makanan.³ Hal tersebut juga ditunjang dengan perilaku konsumen yang cenderung membeli makanan yang harganya murah tanpa memperhatikan kualitas, dengan demikian penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dianggap hal yang biasa oleh produsen.⁴

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai mutu dan keamanan pangan menyebabkan maraknya kasus keracunan makanan serta pelanggaran hak-hak konsumen. Hal tersebut juga diperparah dengan berbagai jenis bahan tambahan makanan (BTM) yang bersumber dari produk-produk senyawa kimia dan turunannya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil dan lain-lain tanpa memperhatikan takaran atau ambang batas serta bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut kepada konsumen⁵. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, keamanan pangan diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan.⁶

Penyebab produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen, yaitu:

³Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Aditya Bhakti, Bandung, 2006. h.56.

⁴Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, h.3.

⁵Ibid.

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

- 1) Konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang dikonsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman.
- 2) Konsumen juga memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsi, sehingga konsumen mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan dan sulit untuk menghindari resiko dari produk-produk makanan tidak bermutu dan tidak aman bagi kesehatan.⁷

Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks jelas membahayakan keselamatan para konsumennya. Bagaimana sebenarnya perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen atas barang konsumsi yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam memperoleh informasi konsumen seringkali beranggapan bahwa makanan dengan harga tinggi identik dengan mutu yang tinggi pula. Bagi golongan ekonomi rendah akan memilih harga yang murah karena golongan ini lebih menitikberatkan pada harga terjangkau daripada pertimbangan lainnya. Penanggulangan agar makanan yang aman tersedia secara memadai, perlu diwujudkan suatu sistem makanan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi makanan tersebut sehingga makanan yang diedarkan tidak

⁷Sofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen hukumnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006. h. 43.

menimbulkan kerugian serta aman bagi kesehatan.⁸Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas tentang perlindungan konsumen, dimana pelaku usaha melakukan kecurangan sehingga membahayakan yang mengkonsumsi produk makanan yang berbahan kimia tersebut.Akhirnya penulis memberi judul karya ilmiah ini yaitu:**“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN-BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA TAHU DIPASAR TRADISIONAL RUMBIO KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999”**.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih memperjelas pengertian dalam penelitian ini agar memudahkan dan memahami istilah-istilah yang digunakan maka penulis mencoba memberikan batasan permasalahan yang terfokus pada penerapan UUPK terhadap pelaku usaha yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya pada tahu di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu yang dijual di Pasar Tradisional Rumbio kabupaten Kampar?
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu di Pasar Tradisional Rumbio kabupaten Kampar?

⁸Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002. h. 118.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu yang dijual di Pasar Tradisional Rumbio kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu di Pasar Tradisional Rumbio kabupaten Kampar.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna bahan-bahan kimia berbahaya pada tahu berdasarkan UUPK.
2. Sebagai sumbangan penulis dalam bentuk karya ilmiah pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu untuk mengetahui persyaratan untuk menempuh ujian sarjana hukum.
4. Diharapkan penelitian ini menjadi alat pendorong bagi penelitian yang lain, yang ingin melakukan penelitian lebih luas dan mendalam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum sosiologis, sedangkan dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna bahan-bahan kimia berbahaya pada tahu berdasarkan UUPK.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis memilih di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar sebagai lokasi penelitian adalah penulis telah melakukan pra riset di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁹ Yang menjadi populasi di dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala desa dan sekretaris di Desa Rumbio
- b. Penjual tahu di Pasar Tradisional Rumbio
- c. Pembeli tahu di Pasar Tradisional Rumbio

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan purposive sampling, artinya peneliti menunjuk langsung konsumen tahu di Desa Rumbio Kabupaten Kampar yang dianggap dapat memberikan informasi sebagaimana yang diharapkan.¹⁰ Adapun yang diambil menjadi sampel adalah:

⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2004. h. 21.

¹⁰Ibid.

- a. Kepala desa dan sekretaris di Desa Rumbio 2 orang
- b. Penjual tahu di Pasar Tradisional Rumbio 24 orang
- c. Pembeli tahu di Pasar Tradisional Rumbio 30 orang

4. Data dan Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang di ambil langsung dari para responden mengenai masalah pokok yang penulis teliti melalui wawancara dan angket yang disebarkan kepada, penjual tahu di Pasar Tradisional Rumbio, pembeli tahu di Pasar Tradisional Rumbio.
- b. Data Sekunder, yaitu Data yang di kumpulkan untuk mendukung tujuan dari penelitian ini, melalui studi perpustakaan, buku-buku, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 dan pendapat para ahli serta Undang-Undang tentang perlindungan konsumen yang masih berlaku.¹¹
- c. Metode pengumpulan data
 - 1. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti.¹²
 - 2. Wawancara, yakni proses tanya jawab secara lisan dengan kepala desa ataupun sekretaris desa Rumbio.
 - 3. Angket adalah mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden dalam penelitian.¹³
 - 4. Studi pustaka

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. h. 23.

¹² Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Cetakan Kelima, CV Alfabeta, Bandung, 2003.h. 21.

¹³Ibid.

d. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka diklasifikasikan menurut jenisnya, kemudian dianalisis dengan melakukan pembahasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999, data yang diperoleh dari hasil wawancara dan angket akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga dapatlah ditarik kesimpulan akhir tentang permasalahan pokok penelitian secara Induktif. (Kesimpulan dari yang khusus kepada hal yang umum).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk mendapat arah permasalahan yang jelas dalam penulisan ini, maka penulis menyajikan dan memakai sistematika V BAB yaitu:

- BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Gambaran tentang keadaan pasar tradisional Rumbio kabupaten Kampar, yang meliputi kondisi umum pasar, pedagang di pasar tradisional Rumbio, ekonomi dan sosial masyarakat Rumbio.
- BAB III : Tinjauan teoritis, pengertian perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, prinsip-prinsip

dalam perlindungan konsumen dan perlindungan hukum bagi konsumen.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan, perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu yang dijual di Pasar Tradisional Rumbio kabupaten Kampar. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu di Pasar Tradisional Rumbio kabupaten Kampar.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PASAR TRADISIONAL RUMBIO

KABUPATEN KAMPAR

A. Kondisi Umum Pasar Tradisional Rumbio

Desa Rumbio adalah salah satu desa dari beberapa desa yang berada didalam wilayah kecamatan Kampar,kabupaten Kampar,propinsi Riau. Di desa Rumbio ada 1 unit Pasar Tradisional yang di buka pada hari Kamis dan Minggu saja. Pasar tradisional Rumbio sebenarnya tidak luas, dulunya luas pasar ini hanya sekitar 1 hektar saja namun beberapa tahun terakhir di perluas, sehingga sekarang pasar tradisional bertambah besar.

Lokasi pasar tradisional Rumbio yang sangat strategis sehingga memudahkan pengunjung untuk mengunjunginya. Selain itu pasar ini juga tidak berada ditepi jalan raya sehingga tidak mengganggu lalu lintas dijalan raya tersebut. Pasar tradisional Rumbio ini juga berada ditepi sungai Kampar sehingga penduduk desa seberang Rumbio seperti Pulau payung dan Teratak menggunakan perahu untuk menyeberang ke pasar tersebut.

Pasar tradisional Rumbio terdiri dari 17 ruko dan beberapa los yaitu los bagi penjual baju, ikan dan daging, beras, dan sebagainya. Pasar tradisional ini dekat dengan Masjid yaitu masjid Takwa Rumbio sehingga memudahkan pengunjung Pasar melakukan ibadah.

B. Pedagang Tahu Pasar Tradisional Rumbio

Pedagang di pasar tradisional Rumbio berjumlah sekitar 300 pedagang yang menjual berbagai macam dagangan seperti: pakaian, sandal, ikan dan daging, sayuran dan buah, serta kebutuhan pangan lainnya. Diantara 300 pedagang diatas ada sekitar 24 pedagang tahu yang berjualan dipasar tradisional Rumbio.

Pedagang tahu yang berjumlah sekitar 24 pedagang ini telah berjualan dipasar tradisional Rumbio selama 5-8 tahun, sebagian besar pedagang tersebut hanya menjual saja dan mengambil barang dagangannya melalui produsen yaitu sekitar 18 orang, selebihnya yaitu 6 orang, mereka membuat sendiri dagangannya.

Tabel II.1. Jumlah Penjual Tahu di Pasar Tradisional Rumbio

No	Keterangan	Jumlah penjual
1	Penjual melalui produsen I	11
2	Penjual melalui produsen II	7
3	Penjual yang membuat sendiri	6
Jumlah penjual		24

C. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1. Ekonomi

Kebutuhan Ekonomi merupakan hal yang paling dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial lainnya, seperti kegiatan jual-beli di pasar tradisional Rumbio dan

lain-lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di desa Rumbio mereka melakukan berbagai aktifitas baik dirumah, dikebun, diladang, dipabrik, dipasar maupun dikantor-kantor. Hal ini tergantung pada aktivitas kerja mereka sesuai dengan kemampuan dan tingkat keterampilan mereka masing-masing. Adapun klasifikasi mata pencaharian masyarakat desa Rumbio adalah;

Tabel II.2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Rumbio

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Petani/ Pekebun	987
2	Wiraswasta	440
3	PNS	856
4	Pedagang	511
5	Honoror	198
6	Lain-lain	57
JUMLAH		3049

(Kantor Desa Rumbio 2013)¹⁴

Kehidupan sosial budaya masyarakat desa Rumbio cukup baik, walaupun terdiri dari masyarakat yang berbeda daerah dan suku. Hal ini dikarenakan azas kekerabatan dan gotong royong masih menjiwai setiap individu masyarakat dan senantiasa menjunjung tinggi jiwa demokrasi.

Dalam pandangan masyarakat desa Rumbio, individu adalah bagian dari masyarakat yang masing-masing mempunyai fungsi dalam masyarakat tersebut. Kepentingan yang ada pada individu adalah seakan

¹⁴Dokumen Desa Rumbio,Maret, 2013.

menjadi kepentingan masyarakat pula. Hal ini dapat dilihat masih terealisasinya system musawarah dalam memecahkan permasalahan masyarakat

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UU no.8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.¹⁵

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, yang bermula dari “benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman dan segala kebutuhan diantara keduanya”.

¹⁵Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 7.

Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang dari Hukum Ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang / jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 april 1999.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.

2. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
3. Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
4. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan
Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
6. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No.
235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang
ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795
/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan
Konsumen

Dengan diundang-undangkannya masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum yang sah dalam soal pengaturan

perlindungan konsumen. Di samping UU Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang juga bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya ditingkatkan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.¹⁶

a. Asas perlindungan konsumen .

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen, yaitu:

a. Asas manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

¹⁶Sadar. M, Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Grasindo: 2004 h. 9.

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.¹⁷

b. Tujuan perlindungan konsumen

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

¹⁷Ibid, h. 15

- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁸

4. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen

a. Prinsip Bertanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati-hati mencegah

¹⁸Op. cit, h 13.

timbulnya kerugian pada konsumen. Berdasarkan teori tersebut, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen. Di samping faktor kesalahan dan kelalaian produsen, tuntutan ganti kerugian berdasarkan kelalaian produsen diajukan dengan bukti-bukti,¹⁹ yaitu :

- a. Pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen.
- b. Produsen tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin kualitas produknya sesuai dengan standar yang aman untuk di konsumsi atau digunakan.
- c. Konsumen penderita kerugian.

Kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen (hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen). Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian juga mengalami perkembangan dengan tingkat responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu:²⁰

- a. Tanggung Jawab atas Kelalaian dengan Persyaratan Hubungan Kontrak

¹⁹Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, h. 20.

²⁰Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta, Grasindo 2004), h.19.

Teori murni prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak. Teori ini sangat merugikan konsumen karena gugatan baru dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat, yaitu adanya unsur kesalahan atau kelalaian dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen, yaitu, pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. Kedua, argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui.

b. Kelalaian dengan Beberapa Pengecualian Terhadap Persyaratan Hubungan Kontrak.

Perkembangan tahap kedua teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian namun untuk beberapa kasus terdapat pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa persyaratan hubungan kontrak merupakan salah satu hambatan konsumen untuk mengajukan ganti

kerugian kepada produsen. Prinsip ini tidak memihak kepada kepentingan konsumen, karena pada kenyataannya konsumen yang sering mengalami kerugian atas pemakaian suatu produk adalah konsumen yang tidak memiliki kepentingan hukum dengan produsen.

c. Kelalaian Tanpa Persyaratan Hubungan Kontrak

Setelah prinsip tanggung jawab atas dasar kelalaian dengan beberapa pengecualian terhadap hubungan kontrak sebagai tahap kedua dalam perkembangan substansi hukum tanggung jawab produk, maka tahap berikutnya adalah tahap ketiga yaitu sistem tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian, tetapi sudah tidak mensyaratkan adanya hubungan kontrak.

d. Prinsip Praduga Lalai dan Prinsip Bertanggung Jawab dengan Pembuktian Terbaik

Tahap perkembangan terakhir dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah dalam bentuk modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini bermakna, adanya keringanan-keringanan bagi konsumen dalam penerapan tanggung jawab berdasarkan kelalaian, namun prinsip tanggung jawab ini masih berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini

merupakan masa transisi menuju pembentukan tanggung jawab mutlak.²¹

b. Prinsip Tanggung jawab Berdasarkan Wanprestasi

Selain mengajukan gugatan terhadap kelalaian produsen, ajaran hukum juga memperkenalkan konsumen untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi. Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya melihat isi kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan. Keuntungan bagi konsumen dalam gugatan berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu suatu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya. Itu berarti apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya tetapi konsumen tetap menderita kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Akan tetapi, dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi terdapat beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen, yaitu :

- a. Pembatasan waktu gugatan.

²¹Ibid h. 16.

- b. Persyaratan pemberitahuan.
- c. Kemungkinan adanya bantahan.
- d. Persyaratan hubungan kontrak, baik hubungan kontrak secara horizontal maupun vertikal.²²

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama *product liability*.

Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar dipasaran. Tanggung jawab mutlak *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya. Penggugat (konsumen) hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan produsen dan kerugian yang dideritanya. Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk barang yang cacat atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan di pihak produsen. Alasan-alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam hukum tentang *product liability* adalah:

²²Sofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen hukumnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006.

- a. Diantara korban/konsumen di satu pihak ada produsen di lain pihak, beban kerugian seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi.
- b. Dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang dipasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk digunakan, bilamana terbukti tidak demikian dia harus bertanggung jawab.²³

5. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha bukan merupakan hal baru. Hal ini disebabkan oleh banyaknya transaksi yang dibuat diluar peraturan yang ada, dalam perkembangannya konsumen semakin menyadari akan hak-haknya dan berjuang dalam hal konsumen menerima prestasi yang tidak sesuai dengan isi kontrak, barang yang dibeli kualitasnya tidak bagus atau ada cacat tersembunyi yang merugikan konsumen dan adanya unsur penipuan atau paksaan dalam melakukan transaksi.

Masa kini fungsi dan perananan Negara terhadap masyarakat bukan hanya menjaga ketertiban dan keamanan tetapi lebih luas dari itu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat atau dikenal juga dengan Negara kesejahteraan. Dalam melaksanakan konsep tersebut,

²³Ibid, h. 19.

perlindungan bagi warga Negara baik sebagai individu maupun sebagai kelompok merupakan suatu yang penting karena tanpa ada perlindungan yang menimbulkan rasa aman bagi rakyat tidak mungkin tercapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu :

a. Perlindungan Hukum Dari Aspek Hukum Administratif

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan melalui hukum administratif dilakukan terhadap pelaku usaha yang melanggar tanggung jawabnya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.

Sanksi administratif yang dijatuhkan bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) UUPK tersebut berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

b. Perlindungan Hukum Dari Aspek Hukum Pidana

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan melalui penuntutan pidana terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK.²⁴

²⁴Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang telah memproduksi atau mengedarkan kosmetika yang mengandung zat aditif berbahaya menurut ketentuan Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa :

- a. Perampasan barang tertentu
 - b. Pengumuman keputusan Hakim
 - c. Pembayaran ganti rugi
 - d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
 - e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
 - f. Pencabutan izin usaha
- c. Perlindungan Hukum Dari Aspek Hukum Perdata

Hubungan konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan perdata dimana proses jual beli barang dan/ atau jasa yang terjadi antara mereka merupakan penerapan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau

karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup. Untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Hal inilah yang menyebabkan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen lebih sering dilihat dari segi masalah perdata, misalnya saja terkait dengan masalah ganti ruginya. Ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPK dapat berupa :

- a. Pengembalian uang atau pengembalian barang dan/ atau jasa yang sejenis dan setara nilainya.
- b. Perawatan kesehatan dan/ atau pemberiansantunan.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen menurut undang-undang;

Pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”*konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik dari kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.”*

Menurut Az. Nasution,”*setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa tersedia dalam masyarakat, digunakan untuk kebutuhan hidup*

²⁵Ibid, h, 132

*pribadi, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak untuk keperluan konsumen”.*²⁶

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Ada sembilan hak yang di tuangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen itu sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan jasa/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

²⁶ A.Z, Nasution, Konsumen ... *op, cit.* h.73.

- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.²⁷

Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan hukum secara patut.

Konsumen kurang mempunyai kesadaran karena asas, kaidah, proses beracara yang berlaku dalam hukum positif sulit diterobos serta lembaga peradilan tidak efisien digunakan oleh konsumen dalam mencari keadilan atas kerugian yang diderita dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha²⁸

²⁷ Sadar. M, Moh. Taufik makarao dan Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Grasindo: 2004.

²⁸ A.Z. Nasution, konsumen...*Op.,Cit....*,h. 35.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan :

Pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, disebutkan pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian diatas adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 6 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen :

- a. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik

- c. Hak untuk mendapatkan pembelaan dari sepatutnya didalam penyelesaian sengketa konsumen
- d. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undanglainnya.

Kewajiban pelaku usaha menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 adalah :

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberi imformasi yang benar, jelas, jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara jujur dan benar serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumenn untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan

- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian penggunaan, pemakaian dan pemamfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensansi, ganti rugi, dan/atau pergantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban-kewajiban diatas merupakan manifestasi hak konsumen, yang akan memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.²⁹

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha menurut pasal 19 hingga pasal 28 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

²⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.* h 34.

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Pasal-pasal yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen yaitu pasal 19, 20, 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.³⁰

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen :

- 1. Ganti rugi dalam bentuk pengembalian uang atau pengganti barang dan/atau setara
- 2. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

4. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha antara lain terdapat pada pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

³⁰*Ibid.*, h., 65.

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yaitu :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, model atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau tanggal waktu penggunaan/pemamfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara “halal” yang dicantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau memuat penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sajian farmasi dan pangan rusak, atau bekas tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha dilarang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Perbuatan pelaku usaha yang dilarang lainnya diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

D. Tinjauan Umum Tentang Bahan-bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan

Banyak makanan yang selama ini masih beredar dimasyarakat yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti boraks dan formalin. Formalin yang selama ini kita tau yaitu adalah suatu zat yang digunakan untuk mengawetkan mayat. Sedangkan boraks dapat digunakan untuk mengawetkan serangga. Apa jadinya bila zat-zat tersebut terdapat disebuah makanan yang kita konsumsi. Zat-zat tersebut tentunya sangat berbahaya apabila masuk kedalam tubuh kita. Zat kimia formalin dan boraks bukan merupakan zat kimia yang boleh ditambahkan kedalam sebuah makanan karena zat tersebut dapat menimbulkan berbagai penyakit hingga mengakibatkan kematian jika kita mengkonsumsinya.

1. Boraks

Boraks merupakan garam natrium yang banyak digunakan di berbagai industri nonpangan, khususnya industri kertas, gelas, pengawet kayu, dan keramik. Boraks biasa berupa serbuk kristal putih, tidak berbau, mudah larut dalam air, tetapi boraks tidak dapat larut dalam alkohol. Boraks biasa digunakan sebagai pengawet dan antiseptic kayu. Daya

pengawet yang kuat dari boraks berasal dari kandungan asam borat didalamnya.

Asam borat sering digunakan dalam dunia pengobatan dan kosmetika. Misalnya, larutan asam borat dalam air digunakan sebagai obat cuci mata dan dikenal sebagai boorwater. Asam borat juga digunakan sebagai obat kumur, semprot hidung, dan salep luka kecil. Namun, bahan ini tidak boleh diminum atau digunakan pada luka luas, karena beracun ketika terserap masuk dalam tubuh.

Efek toksiknya akan terasa bila boraks dikonsumsi secara kumulatif dan penggunaannya berulang-ulang. Pengaruh terhadap kesehatan :

- a. Tanda dan gejala akut : Muntah, diare, merah dilendir, konvulsi dan depresi SSP (Susunan Syaraf Pusat)
- b. Tanda dan gejala kronis :
 1. Nafsu makan menurun
 2. Gangguan pencernaan
 3. Gangguan SSP : bingung dan bodoh
 4. Anemia, rambut rontok dan kanker.

2. Formalin

Formalin merupakan cairan tidak berwarna yang digunakan sebagai desinfektan, pembasmi serangga, dan pengawet yang digunakan

dalam industri tekstil dan kayu. Formalin memiliki bau yang sangat menyengat, dan mudah larut dalam air maupun alkohol. Formalin tidak boleh digunakan sebagai bahan pengawet untuk pangan. Akibatnya jika digunakan pada pangan dan dikonsumsi oleh manusia akan menyebabkan beberapa gejala diantaranya adalah tenggorokan terasa panas dan kanker yang pada akhirnya akan mempengaruhi organ tubuh lainnya, serta gejala lainnya. Pengaruh Formalin Terhadap Kesehatan :

- a. Jika terhirup: Rasa terbakar pada hidung dan tenggorokan , sukar bernafas, nafas pendek, sakit kepala, kanker paru-paru.
- b. Jika terkena kulit : Kemerahan, gatal, kulit terbakar
- c. Jika terkena mata : Kemerahan, gatal, mata berair, kerusakan mata, pandangan kabur, kebutaan
- d. Jika tertelan : Mual, muntah, perut perih, diare, sakit kepala, pusing, gangguan jantung, kerusakan hati, kerusakan saraf, kulit membiru, hilangnya pandangan, kejang, koma dan kematian.³¹

3. Makanan yang Biasanya Mengandung Formalin atau Boraks

1) Mi basah

Penggunaan formalin pada mi basah akan menyebabkan mi tidak rusak sampai dua hari pada suhu kamar (25 derajat Celsius) dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es (10 derajat Celsius).

³¹Winarno, F. G. 2002. Kimia Pangan dan Gizi, Jakarta. Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Baunya agak menyengat, bau formalin. Tidak lengket dan mie lebih mengkilap dibandingkan mie normal. Penggunaan boraks pada pembuatan mi akan menghasilkan tekstur yang lebih kenyal.

2) Tahu

Tahu merupakan makanan yang banyak digemari masyarakat, karena rasa dan kandungan gizinya yang tinggi. Namun dibalik kelezatannya kita perlu waspada karena bisa saja tahu tersebut mengandung bahan berbahaya. Perhatikan secara cermat apabila menemukan tahu yang tidak mudah hancur atau lebih keras dan kenyal dari tahu biasa, kemungkinan besar tahu tersebut mengandung bahan berbahaya, bisa formalin maupun boraks. Selain itu, tahu yang diberi formalin tidak akan rusak sampai tiga hari pada suhu kamar (25 derajat Celsius) dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es (10 derajat Celsius). Tahu juga akan terlampau keras, namun tidak padat. Bau agak mengengat, bau formalin.

3) Bakso

Bakso tidak rusak sampai lima hari pada suhu kamar (25 derajat Celsius). Teksturnya juga sangat kenyal

4) Ikan segar

Ikan segar yang diberi formalin tekstur tubuhnya akan menjadi kaku dan sulit dipotong. Ia tidak rusak sampai tiga hari pada suhu

kamar (25 derajat Celsius). Warna insang merah tua dan tidak cemerlang, bukan merah segar dan warna daging ikan putih bersih.

5) Ikan asin

Ikan asin yang mengandung formalin akan terasa kaku dan keras, bagian luar kering tetapi bagian dalam agak basah karena daging bagian dalam masih mengandung air. Karena masih mengandung air, ikan akan menjadi lebih berat daripada ikan asin yang tidak mengandung formalin. Tidak rusak sampai lebih dari 1 bulan pada suhu kamar (25 derajat Celsius). Tubuh ikan bersih, cerah.³²

³²Ibid h. 36

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini, penulis akan membahas tentang hasil penelitian sebagaimana yang telah dirumuskan didalam BAB I sebelumnya. Dalam hal ini penulis akan mengungkap perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu dipasar tradisional Rumbio , faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan konsumen terhadap bahan-bahan kimia berbahaya pada tahu dipasar tradisional Rumbio. Pembahasan ini dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui observasi atau penelitian langsung ke lapangan,wawancara langsung kepada kepala desa Rumbio ataupun sekretaris desa Rumbio, menyebarkan angket dan studi kepustakaan.

A. Perlindungan Konsumen Terhadap bahan Kimia Berbahaya pada Tahu di Pasar tradisional Rumbio Kabupaten Kampar

Konsumen merupakan suatu mata rantai yang tidak bisa diabaikan dalam menjaga perputaran roda kehidupan. Namun ironisnya keberadaan konsumen yang sangat penting justru lemah dalam perlindungan hukumnya dan sering pula mendapatkan akibat yang memprihatinkan dalam segi kesehatan baik jasmani maupun rohani, hal tersebut disebabkan oleh bahan-bahan yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi seperti penggunaan boraks dan formalin pada tahu.

Oleh karena itu, masyarakat penggemar tahu harus lebih waspada, karena tahu yang beredar di pasaran mayoritas mengandung formalin. Hal ini terungkap ketika Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian dan Polda Pekanbaru melakukan pemeriksaan terhadap 16 jenis makanan di Pasar- pasar kabupaten terdekat. “Dari 16 sampel jenis makanan yang diperiksa, semuanya suspek mengandung bahan berbahaya. Dari empat jenis tahu yakni tahu kuning, putih, besar dan goreng, semuanya positif ditemukan mengandung formalin” kata Kepala BPOM Pekanbaru Drs. Sumaryanta, Apt. MSI usai melakukan pemeriksaan pada hari Selasa lalu (16 Juli 2013).³³

Menurut Drs. Sumaryanta, Apt. MSI, penemuan tahu berformalin tersebut semakin menguatkan dugaan sebelumnya. Berdasarkan data Dinkes kabupaten/kota di Pekanbaru, 90 persen tahu di pasaran mengandung formalin. Hanya saja, pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah penambahan bahan berbahaya itu terjadi saat proses produksi atau distribusi. “Ini harus ada penelusuran lebih lanjut,” ujarnya. Menurutnya, untuk melindungi konsumen atau masyarakat, pemerintah akan melakukan pengecekan lanjutan atas penemuan tahu berformalin tersebut. “Selain penyuluhan kepada produsen, distributor, dan pengecer tahu, ia berharap masyarakat juga waspada. Adanya tahu

³³Pratama Yoga, BPOM pemprov Pekanbaru, [www. Hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses 19 Agustus 2013, jam 13.00 wib.

karena permintaan masyarakat. “Kami warning kepada masyarakat. Selain itu, kami juga akan telusuri dulu,” ujarnya.

Kemudian Drs. Sumaryanta, Apt. MSi juga menjelaskan, tahu berformalin memiliki bau yang menyengat dan teksturnya berminyak. Kemarin, 12 jenis makanan lainnya yang mencurigakan juga diuji. Ke 12 jenis makanan itu antara lain ikan asin, cumi, bakso, otak-otak, pacar cina, jelly, kolang kaling, dan cincau hitam. “Hasil uji ke 12 jenis makanan selain tahu dinyatakan aman,” ucapnya.

Oleh karena itu, pembeli sebagai konsumen juga harus pintar dalam memilih makanan yang akan dibelinya, karena terkadang banyak pelaku usaha yang berbuat curang untuk mendapatkan untung yang banyak dengan mencemari barang produksinya dengan boraks atau formalin agar tahan lama. Berdasarkan angket yang telah disebarkan oleh penulis, maka terlihat jelas bahwa pembeli banyak yang tidak mengetahui tentang bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan seperti formalin dan boraks.

Tabel IV.1 Jumlah Penjual Tahu yang Mengetahui Boraks/Formalin

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mengetahui	5	16%
2	Kurang Mengetahui	8	27%
3	Tidak Mengetahui	17	57%
Jumlah		30	100%

Sumber: Penelitian lapangan, 2013

Pembeli sebagai konsumen harus pandai melihat makanan yang berkualitas bagus dan tidak tergoda dengan harga-harga yang murah tanpa mementingkan kualitasnya. Hal ini diungkapkan oleh sekretaris desa Rumbio Bpk Zulpadri *“para pembeli terkadang tidak sadar bahwa barang yang dibelinya itu tercemar oleh bahan-bahan berbahaya, karena mereka kurang mengetahui tentang hal tersebut dan pembeli yang tergolong pada ekonomi menengah tergoda dengan harga-harga yang murah tanpa mengedepankan kualitasnya”*.³⁴

Dalam perlindungan konsumen ini diperlukan peran dari pemerintah. Karena pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dan bila ada yang melanggar akan menerima konsekuensi hukum yaitu berupa sanksi. Begitu juga dengan peraturan tentang perlindungan konsumen juga harus diterapkan ditengah-tengah masyarakat.

Sebenarnya dalam penerapan perlindungan konsumen ini, terlebih dahulu pemerintah daerah khususnya daerah Rumbio dapat melakukan sosialisasi atau pembinaan terhadap masyarakat dalam memberikan informasi tentang hak-hak pembeli sebagai konsumen dan juga dalam hal bahan tambahan makanan (BTM) yang diperbolehkan pemerintah. Tetapi hal ini, tidak pernah dilakukan sama sekali di desa Rumbio. Oleh karena itu, pembeli mengabaikan kualitas barang-barang yang dibelinya dan lebih mengedepankan kuantitas barang tersebut khususnya tahu.

³⁴Wawancara dengan Bapak Zulpadri, Sekretaris Desa Rumbio, Kabupaten Kampar, Tanggal 7 Agustus 2013.

Tabel IV.2 Jumlah Pembeli yang Mementingkan Kuantitas Dari Pada Kualitas Tahu

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Penting	17	57%
2	Kurang penting	8	27%
3	Tidak penting	5	16%
Jumlah		30	100%

Sumber: Penelitian lapangan, 2013

Selanjutnya, selain pembinaan perlu diadakannya pengawasan dari pihak terkait seperti BPOM. Namun peran BPOM tidak terlihat sedikit pun dipasar-pasar kecil seperti pasar tradisional Rumbio. Para pedagang di pasar tradisional Rumbio ini bahkan banyak yang tidak mengetahui tentang badan pengawasan tersebut. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai peran BPOM dipasar tradisional Rumbio dapat dilihat pada table berikut.

Tabel IV.3 Tanggapan Responden Mengenai Peran Bpom Dipasar Tradisional Rumbio

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Ada	-	0%
2	Pernah ada	2	7%
3	Tidak ada	28	93%
Jumlah		30	100%

Sumber: Penelitian lapangan, 2013

Dari tanggapan responden diatas mengenai peran BPOM dipasar tradisional Rumbio. Maka dapat disimpulkan bahwa BPOM tidak berperan sama sekali di pasar tradisional Rumbio, BPOM ini hanya melakukan

pengawasan di pasar-pasar besar dikota seperti pasar Bangkinang dan itupun dilakukan sekali dalam setahun pada saat mendekati bulan puasa.

Ketika saya melakukan wawancara dengan Sekretaris desa Rumbio Bpk. Zulpadri bahkan mengatakan bahwa “ *Sebenarnya saya tidak tahu mau berkomentar apa tentang peran BPOM atau pengawas dibidang pangan lainnya didesa Rumbio ini, karena tidak pernah ada badan pengawas tersebut mengadakan razia ataupun mengontrol pasar-pasar dan tempat perbelanjaan lainnya didesa ini , tapi saya kurang tau juga jika pengawas tersebut langsung mengadakan razia dipasar tanpa mengambil izin dahulu kepada aparat desa*”.³⁵ Namun ketika saya observasi dan melihat hasil angket dari para penjual tahu maka semua penjual tersebut menjawab tidak ada razia sama sekali bahkan sebagian dari mereka ada yang tidak tahu tentang badan pengawasan tersebut.

Hal yang sama diungkapkan juga oleh Bpk. Edison selaku kepala desa Rumbio “ *BPOM ini melakukan tugasnya hanya sebagai formalitas saja, mereka hanya melakukan razia dipasar-pasar besar dikota contohnya pasar Bangkinang, itupun dilakukan hanya sekali dalam setahun ketika mendekati bulan puasa ataupun saat maraknya berita-berita diTV tentang banyaknya penjual makanan mencemari dagangannya*”.³⁶

Dari hasil penelitian tersebut bisa dilihat bahwa BPOM tidak serius dan tidak tegas dalam menjalankan tugasnya. Bisa kita bayangkan pengawasan saja

³⁵Wawancara dengan Bapak Zulpadri, Sekretaris Desa Rumbio, Kabupaten Kampar, Tanggal 7 Agustus 2013.

³⁶Wawancara dengan Bapak Edison, S, Sos, Kepala Desa Rumbio Kabupaten Kampar, Tanggal 13 Agustus 2013.

tidak dilakukan sama sekali dipasar- pasar tradisional khususnya pasar tradisional Rumbio, apalagi penerapan hukum bagi pelaku usaha yang berbuat curang dengan mencampurkan formalin dan boraks kedalam tahu produksinya agar tahan lama.

Setelah melihat hasil angket dan wawancara yang dilakukan penulis, dapat dikatakan bahwa penerapan UUPK ini tidak berjalan secara maksimal, karena pihak-pihak terkait kurang berperan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menyebabkan banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa hak-haknya sebagai konsumen diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah.

B. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Tahu di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar

Berkaitan dengan penerapan undang-undang perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu di pasar tradisional rumbio kabupaten kamparini, masih banyak tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh subjek didalam perlindungan konsumen tersebut. Sehingga perlindungan konsumen ini tidak berjalan secara maksimal yang disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

1. Konsumen memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsi. Sehingga konsumen mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan khususnya

tahu dan sulit untuk menghindari resiko dari produk-produk makanan tidak bermutu dan tidak aman bagi kesehatan.

2. Konsumen memilih makanan berdasarkan kuantitas tanpa memperhatikan kualitas. Dengan keadaan ekonomi yang terbatas maka konsumen di pasar tradisional Rumbio lebih memilih barang-barang yang murah khususnya tahu padahal mutu barang tersebut belum tentu aman bagi kesehatan.
3. Pelaku usaha tidak sadar akan kewajibannya sebagai pelaku usaha agar mempertimbangkan hak-hak konsumen yang harus diterimanya dari pelaku usaha tersebut.
4. Tidak adanya sosialisasi dan pembinaan bagi pedagang di pasar tradisional Rumbio khususnya penjual tahu. Dalam pembinaan ini pemerintah daerah setempat mengarahkan pedagang tersebut untuk memproduksi barang dengan Bahan Tambahan Makanan (BTM) yang diperbolehkan pemerintah.
5. Kurangnya peran BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi pengawasan pada barang-barang yang beredar di masyarakat. Sehingga para pelaku usaha tidak peduli dan tidak takut untuk berbuat curang.
6. Tidak berjalannya konsekuensi hukum akibat kurangnya pengawasan dan razia pun dilaksanakan sebagai formalitas tanpa adanya tindak lanjut

seperti memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang ditemukan berbuat curang agar pelaku usaha tidak jera dengan perbuatannya.

Sesuai dengan faktor-faktor dalam penerapan perlindungan bagi konsumen ini, Bapak Edison, kepala desa Rumbio juga mengatakan bahwa “*saya rasa dalam penerapan UUPK ini banyak faktor yang menjadi kendalanya terutama kurangnya fungsi pengawasan dari BPOM yang keberadaannya justru sangat penting dalam hal ini*”. Hal-hal tersebut diatas itulah yang menjadi kendala dalam penerapan UUPK ini sehingga banyak konsumen yang dirugikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan demi pembahasan dalam penelitian “Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada Tahu Dipasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” maka terdapat kesimpulan:

1. Perlindungan hukum terhadap bahan-bahan kimia berbahaya pada tahu di pasar tradisional Rumbio tidak berjalan disebabkan pihak-pihak yang terkait didalamnya tidak berperan sama sekali. Selain itu, para pedagang tahu dipasar tradisional Rumbio juga tidak mendapatkan pembinaan sehingga para pedagang tidak peduli dengan keselamatan konsumen.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan konsumen terhadap bahan-bahan kimia pada tahu di pasar tradisional Rumbio yaitu kurang mengetahuinya konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen dan pelaku usaha pun tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Selain itu faktor yang paling berpengaruh adalah BPOM tidak serius dan tidak tegas dalam menjalankan tugasnya, BPOM hanya melakukan razia sebagai formalitas dan hanya dipasar-pasar besar saja yang dilakukan hanya sekali dalam setahun pada saat mendekati bulan ramadhan. Akibatnya sanksi yang seharusnya diberlakukan tidak dijalankan sama sekali. Pasal 60 s/d 63 UUPK yang mencantumkan

tentang sanksi seakan-akan tidak pernah dipahami oleh pengawas-pengawas tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Hendaknya Pengetahuan penjual tahu dipasar tradisional rumbio kabupaten Kampar perlu ditingkatkan mengenai bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan.
2. Hendaknya konsumen lebih pintar mengolah informasi agar mengetahui barang-barang yang berkualitas baik dan juga konsumen harus mengetahui hak-hak nya sebagai konsumen.
3. Sebaiknya konsumen lebih teliti dalam memilih makanan khususnya tahu, lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas.
4. Hendaknya aparat desa memberi pembinaan dan sosialisasi pada pedagang di pasar tradisional rumbio khususnya pedagang tahu.
5. Sebaiknya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) lebih gencar melakukan razia, tidak hanya dipasar yang letaknya di perkotaan tetapi juga harus memperhatikan pasar-pasar tradisional dan menjalankan tugas tidak hanya sebatas formalitas saja.
6. Sebaiknya jika pengawasan pemerintah menemukan pelaku usaha yang menjual makanan yang sudah tercemar, berikanlah sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

7. Hendaknya UUPK ini dijalankan dan diaplikasikan, supaya UUPK ini tidak hanya sebagai peraturan yang dapat dibaca-baca saja tetapi ada pengaplikasiannya ditengah masyarakat. Selain itu, sesuai dengan peraturan maka para pelaku usaha yang berbuat curang dikenakan sanksi agar para pelaku usaha yang berbuat curang tersebut akan jera akibat adanya sanksi yang tegas dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2004.
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media : 2011
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002
- Sadar. M, Moh. Taufik makarao dan Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Grasindo: 2004
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta, Grasindo 2004).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Aditya Bhakti, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen hukumnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006.
- Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan Kelima, CV Alfabeta, Bandung, 2003.
- Winarno, F. G, *Kimia Pangan dan Gizi*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Data-Data

Sumber : Kantor Desa Rumbio Kabupaten Kampar.

Wawancara dengan Bapak Edison, S, Sos, Kepala Desa Rumbio Kabupaten Kampar, Tanggal 13 Agustus 2013.

Wawancara dengan Bapak Zulpadri, Sekretaris Desa Rumbio, Kabupaten Kampar, Tanggal 7 Agustus 2013.